

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KETIGA JUNI 2012

Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012, Pertengahan Juni 2012 AKD-DPR menjalankan kegiatan bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Berikut ringkasannya.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

PELAKSANAAN BIDANG LEGISLASI

Komisi VIII DPR-RI telah menyelesaikan 2 RUU Konvensi pada tanggal 6 dan 7 Juni, yaitu RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, dan RUU tentang protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Kedua RUU ini telah diselesaikan dalam pembicaraan tingkat I bersama Pemerintah.

Intisari RUU pertama, adalah mengacu kepada Pembukaan UUD 1945 dan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28B ayat (2). Ketentuan ini juga mempunyai arti bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan, atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak, termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya, tidak saja merupakan tanggungjawab orangtua, keluarga, bangsa dan negara, melainkan diperlukan kerjasama internasional. Bahwa meningkatnya penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dalam lalu-lintas internasional perlu diperkuat melalui penegakan hukum secara nyata dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

RUU kedua, mengacu kepada Pembukaan UUD 1945



serta jaminan perlindungan hak dasar sesuai nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus yang perlu dijamin kelangsungan eksistensinya di masa depan. Keberadaan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan dampak serius serta konsekuensi jangka panjang bagi anak. Peperangan dan konflik bersenjata kini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk anak-anak. Sering dijadikan sasaran penyiksaan dan pembunuhan sebagai bagian dari strategi perang. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata adalah pelanggaran hak-hak anak, oleh karena itu, dengan memperhatikan berbagai akibat yang sangat

merugikan anak, masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak sebagaimana tercantum dalam Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.

Kedua RUU ini segera akan diagendakan didalam Rapat Parpiurna terdekat melalui penjadwalan oleh Rapat Bamus.

PELAKSANAAN BIDANG ANGGARAN

Sesuai dengan jadwal pembahasan RKP Tahun 2013 dan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan RAPBN Tahun 2013, Badan Anggaran dari tanggal 11 s.d 14 Juni 2013 melakukan Rapat Panja RKP 2013 dan Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN Tahun 2013.

Panja RKP Tahun 2013, membahas tentang Tema RKP Tahun 2013 yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Tema RKP

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra Sasmita; Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Tahun 2013 tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, yaitu (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik, (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, (12) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Lainnya, (13) Bidang Perekonomian Lainnya, dan (14) Bidang Kesejahteraan Lainnya.

Sedangkan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN Tahun 2013 selain membahas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2013, juga membahas kebijakan di bidang fiskal tahun 2013 antara lain kebijakan penerimaan perpajakan, kebijakan subsidi energi BBM dan listrik, kebijakan defisit anggaran, pembiayaan utang dan non utang serta SLA.

Komisi Komisi dewan pada minggu minggu ini telah membahas mengenai usulan pagu anggaran untuk RAPBN TA 2013, dengan pasangan kerjanya masing masing.

PELAKSANAAN BIDANG PENGAWASAN

Minggu yang lalu, tanggal 6 Juni, Rapat pengawas Tim Century dengan Kapolri telah mengagendakan pembahasan: [1] membahas *progress report* penanganan Kasus Bank Century, [2] tanggapan Kapolri terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Lanjutan BPK-RI atas Kasus PT. Bank Century.

Dalam Raker tersebut, Kapolri telah melaporkan bahwa Kepolisian RI telah melakukan proses penyidikan terhadap 11 laporan dengan jumlah tersangka sebanyak 37 orang dan jumlah berkas perkara yang diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebanyak 40 berkas perkara. Sampai dengan laporan itu, terdapat tambahan penyelesaian perkara sebanyak 2 berkas yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Jumlah perkara yang selesai (P21) sebanyak 24 perkara yaitu: [1] sudah vonis pengadilan: 14 perkara; [2] dalam proses penuntutan: 7 perkara; [3] menunggu proses sidang: 3 perkara. Sebanyak 16 perkara masih dalam penyidikan dan penyidikan yang masih dalam proses penyelesaian.

Kapolri juga telah melakukan kegiatan Tim Terpadu dengan meminta bantuan timbal-balik dalam masalah pidana/*mutual legal assistance in criminal matters* (MLA) yang dikirim melalui Kemenkumham kepada 15 negara. Sampai saat ini MLA tersebut telah dijawab oleh 4 negara, dan perkembangan terakhir ditambah 2 negara. Kapolri juga melaporkan hasil pemeriksaan investigasi lanjutan Kasus Bank Century, termasuk menelaah dan mendalami 13 temuan BPK.

Kesimpulan Raker, bahwa penanganan kasus Bank century yang ditangani Polri terhadap dugaan tindak perbankan, pencucian uang dan tindak pidana umum mengalami kemajuan, namun, masih diperlukan upaya-upaya oleh Polri

antara lain: menyelesaikan 16 berkas perkara yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan; menangani masalah/kasus yang belum tertangani, diantaranya kasus pemalsuan dokumen akta notaris penyerahan FPJP oleh pejabat BI; kasus aliran dana Bank Century kepada Amiruddin Rustam serta kasus pemecahan deposito milik Budi Sampoerna dll, khususnya yang telah mendapat perhatian publik. Tim pengawas Century berpendapat bahwa, keputusan pengadilan tentang pengembalian dana nasabah Antaboga yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh Bank Mutiara (Bank Century), dan meminta kepada Polri untuk memberikan perhatian atas tuntutan nasabah Bank Century (kasus Antaboga). Tim terpadu pengembalian aset Bank Century harus bekerja lebih efektif melakukan pengejaran dan pengembalian aset-aset Bank Century yang dilarikan ke luar negeri bekerjasama melalui *mutual legal assistance*.

Dalam fungsi pengawasan, Komisi-Komisi DPR melakukan kegiatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) tahun 2011, dengan pasangan kerja masing-masing.

BKSAP

Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) yang baru telah terbentuk minggu yang lalu dengan susunan, Ketua KH. DR. Surahman Hidayat, M.A., Wakil Ketua: H. Hayono Isman, S.IP Sidharto Danusubroto, H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H.

Pimpinan BKSAP yang baru bersama dengan anggota BKSAP siap melaksanakan tugas dalam rangka membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Pimpinan BKSAP akan segera mempersiapkan pertemuan *Executive Committee Meeting AIPA* dan Sidang *AIFOCOM to Combat the Drug Menace* ke-9 di Jogjakarta pada tanggal 8-11 Juli 2012.

Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Dubes LBBP Negara Sahabat

Pemberian pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP Negara Sahabat telah diberikan melalui Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi I terhadap 4 negara yaitu: [1] Tn. Manuel Antonio Saturno Escala sebagai Dubes LBBP Republik Panama untuk Indonesia berkedudukan di Jakarta, [2] Tn. Idriss Rauoa Ouedaogo sebagai Dubes LBBP Burkina Faso untuk Indonesia berkedudukan di New Delhi, [3] Tn. Molosiwa Selempeng sebagai Dubes LBBP Republik Botswana untuk Indonesia berkedudukan di Canberra, [4] Tn. Candradath Singh sebagai Dubes LBBP Republik Trinidad and Tobago untuk Indonesia berkedudukan di New Delhi India.

Kunjungan Komisi III ke PN Semarang, Legal

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika menegaskan kunjungan lapangan 5 orang anggota yaitu Azis Syamsudin, Nasir Djamil, Ahmad Yani, Syarifudin Sudding dan Aboe Bakar Alhabsy ke Pengadilan Negeri Semarang adalah penugasan resmi dari Komisi.



Suasana Komisi III DPR usai melakukan rapat

Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (12/6/12) terkait pengaduan Koalisi LSM ke Badan Kehormatan yang menyebut kunjungan itu tanpa koordinasi dan diduga intervensi terhadap proses peradilan yang melanggar kode etik DPR.

“Kunjungan teman-teman itu legal. Saya sudah cek, meskipun saya memimpin Komisi III baru ya. Mereka berangkat ke Semarang persis pada saat saya dilantik sebagai Ketua. Materi sudah pernah dibahas dalam rapat konsultasi dengan MA kemudian dicek ulang kebawah, benar tidak penjelasan yang ada. Ternyata pada saat kunjungan lapangan banyak temuan,” jelasnya.

Ketika ditanya wartawan kenapa ada anggota Komisi III mengaku tidak tahu kunjungan tersebut. Ia memaparkan kondisi seperti itu bisa saja terjadi. “Saya baru saja memimpin rapat internal Komisi, ada anggota minta izin



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika saat menjawab pertanyaan wartawan

tidak datang karena ada tugas lain, ya dia nggak tahu hasil rapat-kan,” lanjutnya.

Ia meminta segenap pihak dapat memahami, salah satu tugas konstitusional anggota DPR adalah melakukan pengawasan, memastikan UU berjalan sesuai koridornya. Terkait kasus pemindahan sidang Walikota Semarang (nonaktif) Soemarmo HS ke Jakarta menurutnya mengacu pada pasal 84 UU KUHP yang menekankan locus

delicti persidangan adalah dimana peristiwa pidana itu terjadi.

Kemudian pasal 85 yang sifatnya *lex specialis* menjelaskan persidangan boleh dipindahkan dengan persyaratan tertentu. “Nah persyaratan yang diatur UU ini terpenuhi atau tidak? Ini tugas DPR untuk mengawasi apakah UU dijalankan dengan benar oleh penegak hukum, karena tidak selamanya penegak hukum taat hukum,” tandasnya. (iky)foto:wy/parle

Panja RUU Pangan Belum Sepakat Mengenai Pembentukan Kelembagaan

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pangan (Panja RUU Pangan) dengan Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan wakil dari Kementerian Dalam Negeri Senin (11/6) di Gedung DPR RI, Jakarta belum mencapai kesepakatan pembentukan kelembagaan pangan.

“Rapat Panja yang membahas RUU tentang Pangan dengan pemerintah belum mencapai kesepakatan, dan setelah diskors untuk lobi, tetap belum mencapai kesepakatan pembentukan Badan Otoritas Pangan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron usai memimpin rapat panja tersebut.

Dijelaskan Herman, karena rapat Panja RUU Pangan belum mencapai kesepakatan, diputuskan untuk menjadwalkan ulang untuk melanjutkan pembahasan.

“DPR berharap pembahasan RUU Pangan sudah selesai sebelum berakhirnya Masa Persidangan IV saat ini,” imbuhnya.

Menurut Politisi dari Partai De-

mokrat, secara umum Komisi IV sepakat bahwa substansi RUU Pangan sudah komprehensif dan memiliki semangat yang sama untuk segera menyelesaikannya. Namun masih ada ganjalan pada kelembagaannya.

Draft RUU Pangan dari DPR RI mengenai kelembagaan yang diwujudkan dalam Badan Otoritas Pangan, menurut Ketua Departemen Pertanian DPP Partai Demokrat belum disetujui pemerintah.

“Pada Daftar Inventaris Masalah (DIM) nomor 636 yang disampaikan pemerintah, masih bersikukuh untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan nasional dapat dibentuk lembaga pemerintah yang

menangani bidang pangan,” jelas Herman.

Sesuai usulan pemerintah, kata Herman, lembaga tersebut berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketidaksepahaman antara Komisi IV DPR RI dan pemerintah pada usulan lembaga pengelola ketahanan pangan, menurutnya pada pencantuman kata “dapat”.

Pencantuman kata “dapat” tersebut menjadi sorotan fraksi-fraksi, karena dengan mencantumkan kata “dapat” mengandung arti dapat dibentuk atau tidak dapat dibentuk kelembagaan pangan, ujar Herman. (sc)foto: wy/parle



Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron



Menteri Pertanian RI, Suswono

Sosialisasi Jardiknas dan E-learning Minim

Panja Evaluasi Jardiknas dan E-Learning (Pembelajaran) Komisi X DPR RI meninjau secara langsung pelaksanaan Jardiknas dan E-Learning di dua sekolah yaitu SMAN 5 dan SMKN 8 di Propinsi Sulawesi Selatan beberapa hari yang lalu.



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri mengamati jaringan internet di SMAN 5 Makassar

Kunjungan itu bertujuan mendapatkan masukan data-data faktual mengenai persoalan pelaksanaan Jardiknas dan E-Pembelajaran.

“Jumlah capaian sekolah yang terkoneksi oleh jardiknas melalui schoolnet di Sulawesi Selatan masih sangat minim,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri, baru-baru ini.

Menurutnya, dari sekitar 10 ribu sekolah di Sulsel baru ada 635 sekolah yang tercover atau sekitar 5.9 persen. Capaian ini masih terpaut jauh dengan rata-rata nasional yang baru mencapai 9.8 persen.

Dia menambahkan, sosialisasi Jardiknas dan e-learning masih sangat minim. Hal ini terlihat ketika mengunjungi SMAN 5 Makasar yang merupakan sekolah model dan menjadi rujukan di Sulsel yang ternyata pihak manajemen sekolah tidak mengetahui istilah jardiknas dan schoolnet.

Dia mengatakan, sosialisasi yang dilakukan pustekom, dan Kemendikbud baru mampumenjangkau ke level dinas pendidikan provinsi karena keterbatasan anggaran dan ketentuan

batasan penggunaan anggaran untuk pengelolaan Jardiknas. “Pustekom Kemdikbud sebenarnya mengharapkan sosialisasi di daerah dapat dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sehingga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pusat,” jelasnya.

Pusat, lanjutnya, memiliki keterbatasan untuk menjangkau sekolah seluruh Indonesia, baik keterbatasan sumberdaya manusia maupun keter-

batasan anggaran. “Kapasitas jaringan yang disediakan oleh pemerintah di schoolnet sangat minim sehingga pemanfaatan e-pembelajaran kurang maksimal karena koneksi yang terbatas,”ujarnya. Hampir di semua sekolah terjadi over pemanfaatan terhadap koneksi yang disediakan oleh jardiknas. Oleh karena itu beberapa sekolah mensiasatinya dengan menyediakan jaringan tambahan yang dibiayai secara mandiri oleh sekolah. (eh)

Saat pertemuan dengan Tim Panja, Kepala Sekolah SMAN 5 Abdul Rachman menjelaskan, SMAN 5 mendapatkan penghargaan dari dinas propinsi dengan nilai terbaik dan menjadi rujukan khusus untuk sekolah model serta mendapat urutan ke 40 dari 132 sekolah se Indonesia.

“Kegiatan proses belajar-mengajar menggunakan ICT dari tiap kelas proses pembelajaran dan kegiatan ekstra diwajibkan khususnya kelas 10 dan 11 yaitu kegiatan pengembangan diri untuk berkonsentrasi menghadapi ujian nasional dan dari tahun ketahun ada peningkatan dalam arti kata 100 % kelulusan dan itu target untuk masuk PTN,”ujarnya. (hr) foto:hr



Pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR dengan Diknas Pemprov Makassar di SMAN 5 Makassar

Kementerian PU Diminta Tingkatkan WDP Jadi WTP

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan laporan keuangannya. Jika sejak tahun 2009 predikat kementerian ini masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun yang akan datang diharapkan laporan keuangan ini meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Harapan ini disampaikan sejumlah anggota Komisi V DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, Rabu (13/6), yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow.

Anggota Komisi V Teguh Juwarno mengatakan, untuk mendapatkan predikat WTP tentunya perlu tata kelola yang baik dan perlu disupport oleh tenaga-tenaga yang memang relevan untuk menangani persoalan itu.

Untuk itu dia menanyakan, berapa jumlah pegawai yang berlatar belakang akuntan di kementerian ini. Menurutnya, pertanyaan ini penting dia ajukan mengingat untuk menjawab tuntutan kementerian ini mendapat predikat WTP dari BPK perlu ditunjang dengan SDM yang ahli di bidangnya.

Teguh mengusulkan, untuk rekrutmen ke depan dia berharap hal ini menjadi bahan pertimbangan, merekrut pegawai dengan latar belakang akuntansi. Tenaga-tenaga profesional di bidangnya ini sangat diperlukan agar laporan keuangan kementerian ini menjadi lebih baik.

Senada dengan itu, anggota Komisi V lainnya Malkan Amin mengatakan, untuk memperbaiki laporan keuangan kementerian ini perlu dilakukan pembenahan-pembenahan. Dia mengusulkan dibuat suatu Tim. Sebab, katanya, dengan pola kerja selama ini tidak terlalu banyak memperbaiki keadaan.

“Jadi dibuat tim oleh aparat yang tidak terlalu sibuk, tetapi tahu persoalannya di bawah pengawasan Inspektur Jenderal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kementerian PU tahun 2011 masih Wajar Dengan Pengecualian. Opini WDP ini, katanya,



Anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya

diberikan kepada laporan keuangan PU sejak tahun 2009 dan 2010.

BPK menilai laporan keuangan Kementerian PU tahun 2011 telah menyajikan secara wajar, semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian PU tanggal 31 Desember 2011 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Djoko menambahkan, pada laporan hasil pemeriksaan BPK untuk laporan keuangan Kementerian PU 2011 terdapat temuan terkait sistem pengendalian intern sebanyak 13 temuan dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 11 temuan.

Temuan terkait Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian

PU, adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penatausahaan Aset Rumah Negara sebanyak tiga temuan.

Selain itu, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian dan pencatatan aset belum optimal sebanyak 5 temuan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Rusunawa belum optimal sebanyak satu temuan.

Sementara untuk temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yakni, kelebihan pembayaran dan denda sebanyak enam temuan, tanah belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, sebanyak satu temuan, pencatatan dan pelaporan aset tetap sebanyak tiga temuan dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebanyak satu temuan. (tt) foto:wy/parle

Komisi IX DPR Prihatin Adanya Permasalahan Asuransi TKI

Hingga saat ini masih banyak klaim-klaim asuransi yang ditolak oleh pihak Asuransi, hal tersebut membuat Komisi IX DPR merasa prihatin dengan keadaan ini, dan meminta segera dicari solusi terbaik untuk para TKI.



Suasana rapat Komisi IX DPR

Demikian dikatakan anggota Komisi IX DPR Mohamad Iqbal, pernyataan ini disampaikan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirut PT Asuransi Sentral Asia, Dirut PT Paladin Internasional Tirzan Amir, di ruang rapat komisi IX DPR Senayan, Jakarta, Rabu (13/6) siang.

Anggota Komisi IX DPR Moh. Iqbal menambahkan, masih banyak para TKI yang dianggap melakukan kegiatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang tertulis dan mendapat persetujuan oleh TKI itu sendiri.

Iqbal juga mengemukakan, seolah-olah ada kesan kesalahan dari para TKI, padahal semestinya pihak-pihak yang berkompeten memahami dengan kondisi para calon TKI yang kebanyakan berpendidikan rendah, dan pastinya mereka tidak memahami apa saja ten-

tang isi perjanjian antara PT Asuransi dengan para Calon TKI tersebut.

Dengan persoalan ini para calon TKI tahunya hanya mendatangi saja, sehingga mereka tidak tahu secara keseluruhan maka jangan disalahkan apabila banyak para TKI-TKI yang pulang tidak sesuai dengan kontrak.

selain itu, lanjutnya, ada persoalan yang lain seperti ada cek up di negara yang bersangkutan dan banyak mayoritas yang tidak lulus. "secara umum PT Asuransi tidak bisa mengklaim asuransi yang mereka bayarkan sebelum pergi,"paparnya.

Menurutnya, walaupun bukan kesalahan dari pihak asuransi tetapi ini persoalan dari pihak PJTKI karena asuransi ini bagian dari hilir dan hanya operator saja,

Sementara Direksi PT Paladin Internasional Tirzan Amir mengatakan,

denga telah terjadinya penolakan Klaim-klaim asuransi TKI ini disebabkan karena tidak ditegaskannya UU No.39 tahun 2004 pasal 35 tentang perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja juga tentang pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

Tirzan Amir menambahkan, terjadinya klaim-klaim bermasalah salah satunya adalah adanya TKI yang berangkat ke luar negeri tanpa berasuransi, mungkin berasuransi tetapi tidak prosedural, hal ini dimungkinkan terjadi karena tidak adanya standarisasi pelayanan di embarkasi, selain itu juga adanya pendapat bahwa semua WNI berhak keluar negeri sebagai pencari kerja, dan bukan sebagai TKI yang harus membeli asuransi.

Terjadinya TKI bermasalah salah satunya disebabkan oleh TKI yang melakukan perpanjangan kerja, namun tidak dapat melakukan perpanjangan asuransi karena KBRI beranggapan hal ini bertentangan dengan fungsi dan kewenangannya serta bertabrakan dengan konvensi WINA.

Tirzan Amir mengatakan, konsorsium proteksi TKI telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU No.39 tahun 2004, sehingga klaim-klaim bermasalah yang terjadi akibat pelanggaran UU No.39 oleh stakeholder terkait yang berada dihilir bukanlah merupakan tanggungjawab konsorsium proteksi TKI yang di hilir.

Dengan adanya sistem informasi online yang lebih baik dibandingkan masa lalu, lanjut Tirzan, diharapkan konsorsium proteksi TKI mampu memberikan informasi tentang penempatan dan klaim yang akurat, cepat dan komprehensif, serta mengenai permasalahan yang ada sekarang ini dan juga bisa diakomodir oleh masyarakat luas melalui web site.(Spy)/foto:iwan armianas/parle.

Komisi I Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan di Papua

Komisi I mendesak Pemerintah untuk membuat formula dalam upaya menyelesaikan permasalahan kekerasan di Papua. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Ruang Komisi I DPR RI setelah melakukan kunjungan ke Papua, dalam rangka mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah Papua, Senin (11/6).

Dijelaskan, Pada kesempatan itu Komisi I telah berdialog dengan berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari unsur gereja, ormas muslim, akademisi, LSM, komnas HAM Papua dan kalangan aktivis perempuan. Tim juga telah berdialog dengan BIN di Papua, Pangdam Cendrawasih, Polda Papua, dan juga melakukan peninjauan lapangan ke tempat-tempat terjadinya aksi kekerasan. Tim juga telah berdialog dengan pejabat Gubernur Papua, ketua DPRP, ketua MRP, KPU Prov Papua dan UP4B.

Menurut Mahfudz, hasil kunjungan ke Papua, Yang pertama ada pengakuan terjadi peningkatan eskalasi kasus-kasus kekerasan bersenjata yang sudah sangat meresahkan masyarakat, dan pihak kepolisian juga mengakui dalam dua bulan ada 21 kasus kekerasan dengan 13 korban tewas, bahkan setelah kunjungan komisi I ke Papua ada 1 lagi korban, jadi 14 korban.

Yang kedua, lanjutnya, ada penjelasan dari pihak kepolisian setempat bahwa mereka (Kepolisian) memang lamban di dalam penanganan ini karena ada beberapa sebab, "satu, mereka tidak ingin tergiring untuk melakukan tindakan represif yang kemudian akan terjadi reaksi balik dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu di sana. Kedua mereka memang menjadi sangat ragu-ragu kalau tindakan represif itu dikelola, opininya menjadi isu-isu pelanggaran HAM," kata Mahfudz.

Selanjutnya, Mahfudz, mengungkapkan aspirasi dari masyarakat yang ditemui komisi I, menginginkan pihak Kepolisian segera mengungkap dengan cepat, tegas, dan proses hukum siapapun yang menjadi pelaku, karena ini sudah meresahkan mereka.

Kesimpulan lain yang diambil dari

kejadian ini, paparnya, karena polanya acak dan korbannya acak, ini merupakan pengkondisian agar terjadi kecemasan dan ketakutan massa menjelang ada dua momentum yaitu 1 juli ulang tahun OPM, tanggal 3 juli akan ada rencana kunjungan Presiden

pelakunya, bisa saja dari kelompok sipil bersenjata, atau seperti yang disampaikan pihak kepolisian dilakukan oleh kelompok sipil yang membangun kantong-kantong komunitas di pesisir Jayapura.

Dia menambahkan, ada perubahan



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat menjawab pertanyaan wartawan

SBY ke Papua dalam acara Jambore Nasional di Raimuna yang juga dihadiri oleh utusan luar negeri. "Ini merupakan sesuatu yang di desain untuk memicu atau memancing reaksi dunia internasional," ungkapnya.

Mahfudz menjelaskan, fakta temuan Komisi I DPR, bahwa kasus penembakan ini dilakukan dari jarak dekat dengan senjata laras pendek, berbeda dengan penembakan di Freeport yang dilakukan dari jarak jauh dengan senjata laras panjang. Sehingga kasus terakhir ini membuka ruang spekulasi yang lebih luas siapa actor

di dalam konfigurasi sosio demografis di pesisir, dimana banyak warga pegunungan yang sekarang turun ke pesisir dan ke kota-kota. Hal ini akan menumbuhkan masalah sosial, ekonomi dan kerawanan. "Ini situasi yang semakin sulit, sehingga Komisi I menginginkan Pemerintah harus punya suatu formula yang lebih tepat, dengan menghindari pendekatan keamanan. Karena begitu pendekatan keamanan diperkuat, Ini justru yang mereka tunggu akan terjadi reaksi balik, terjadi kekerasan massif dan ini akan lebih sulit," katanya.

Ketika berdialog dengan kelompok

masyarakat, mereka menyatakan isu pembangunan dan isu kesejahteraan bukan lagi tema pokok. Bahkan yang menarik dan membingungkan bagi Mahfudz, ketika 9 bulan lalu UP4B mulai bekerja di Papua, ada penolakan terhadap UP4B, “karena menurut mereka percuma akan diselesaikan pembangunan, seperti nyatanya Otsus belum bisa memberikan pembangunan yang diinginkan mereka,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan, mereka sepakat adanya dialog antara Jakarta dengan Papua, pada kesempatan itu, Pemerintah juga menawarkan konsep dialog tentang Papua. menurutnya keduanya dapat disinkronisasi, artinya dialog awal semua pihak duduk bersama bicara tentang Papua mengenai cara pandang yang sama tentang Papua, Dan Pemerintah

Pusat harus mempunyai formula untuk dialog selanjutnya, dan masyarakat Papua diberi ruang untuk mereka mengkonsolidasi gagasan.

Dia mendukung pandangan Presiden SBY dan pernyataan Menkopolkam, ingin membangun Papua dengan Damai. “Tidak ada jalan hanya dengan Dialog, karena pendekatan keamanan justru ditunggu oleh mereka kelompok-kelompok garis keras untuk kemudian dibalik menjadi suatu kekacauan yang lebih besar,” tegas Mahfudz.

Keterlibatan Asing

Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin mengatakan kasus kekerasan di Papua, ada keterlibatan pihak asing. “Saya tidak akan sebutkan namanya. Jadi pelakunya asing, dan asli daerah

yang dibina,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan baru-baru ini.

Politikus PDI Perjuangan itu enggan menjelaskan siapa pihak asing yang dimaksud. Ia mengatakan perlu konsep dan perencanaan yang jelas untuk menangani masalah ini. TB Hasanuddin menuturkan masalah pokok di Papua adalah terkait Hak Asasi Manusia akibat adanya tindakan represif, selain itu ada upaya membawa kasus kekerasan di Papua ke dunia internasional.

Menurut TB, kasus di Papua tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, Kapolda dan Pangdam setempat. Harus ada operasi besar tingkat nasional dan internasional. “Operasi dan rencana operasi sebenarnya bisa diketahui. Tinggal mau atau tidak,” kata TB Hasanuddin. (as)foto:wy/parle

DPR Minta Pemerintah Selesaikan Tenaga Honorer Teranulir

Komisi II DPR minta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer Teranulir.



Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo pada Raker Komisi II DPR dengan MenPan dan BKN

“Mekanisme dan tahapan penanganan Kategori II (K) dan teranulir akan disampaikan kepada Komisi II DPR pada tanggal 25 Juni 2012” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo saat membacakan hasil kesimpulan Raker dengan MenPAN

Azwar Abubakar dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di DPR, Jakarta, Senin (11/6).

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi II DPR meminta Kementerian PAN dan RB untuk melakukan uji public terhadap data Tenaga Honorer Kategori II

(K2), melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan data yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Selanjutnya, Komisi II DPR mengharapkan Kementerian PAN dan RB bersama BKN dapat melanjutkan verifikasi dan validasi atas hasil uji publik data Tenaga Honorer Kategori I dan mengangkat menjadi CPNS pada tahun 2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi II DPR memberikan apresiasinya kepada pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB yang telah menetapkan PP No.56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS.

Terkait peraturan pelaksanaan dari UU No.25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, Komisi II DPR mendorong Kementerian PAN dan RB untuk segera merealisasikan 5 (lima) RPP yang diharmonisasi menjadi 1 (satu) RPP, yang diharapkan bisa ditetapkan pada bulan Juli 2012.(nt) foto:wy/parle

Indonesia Dukung Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Indonesia berkomitmen terus mendukung dan berjuang demi terwujudnya kemerdekaan bangsa Palestina. Dukungan bangsa Indonesia kepada bangsa Palestina bukan hanya dukungan dari perorangan atau kelompok, tetapi juga dukungan konstitusi.

“Mendukung hingga bangsa Palestina menang memperoleh kemerdekaan,” kata Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin didampingi Ketua Kaukus Palestina Al Muzammil Yusuf.

Dalam Pertemuan antara Komisi I dengan Wakil Ketua Parlemen Palestina H.E. Mr. Ahmad Muhammad Atiyah Bahr, Indonesia juga memberikan beasiswa kepada Palestina, berupa 10 beasiswa Program Magister Universitas Gunadarma bekerjasama dengan Program Beasiswa Unggulan Setjen Kemdikbud, dan 5 beasiswa strata 1 dari Universitas Pasundan, di Gedung DPR RI, Rabu (13/6).

Al Muzammil Yusuf mengatakan, Kaukus Palestina telah berdiri sejak tahun 2007 dan mendapat dukungan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR.

Dia menerangkan, kegiatan Kaukus Palestina yang pernah dilakukan untuk mendukung perjuangan Palestina, yaitu mengadakan diskusi dan demonstrasi parlemen, hingga membuat surat penolakan kedatangan negara Israel untuk mengikuti Sidangke-116 Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Uni Parlemen Sedunia di Bali. “Kami mengecam Israel telah menahan Anggota Parlemen Palestina,” tegasnya.

Wakil Ketua Parlemen Palestina menyampaikan Terima kasih dan rasa bangganya kepada Bangsa Indonesia. “Indonesia merupakan teman dan saudara sejati bagi Bangsa Palestina, Bangsa Palestina tidak sendiri memperjuangkan kemerdekaannya,” Kata Ahmad Muhammad Atiyah Bahr.

Perhatian Indonesia terhadap bangsa Palestina, lanjutnya, mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa Palestina dan dunia. Pembangunan Rumah Sakit Al royan atas bantuan Indonesia saat ini dalam proses penyelesaian. “Bantuan Kesehatan sangat



Serah terima draft beasiswa dari Univ. Gunadarma kepada parlemen Palestina disaksikan pimpinan dan anggota Komisi I DPR

berperan untuk membantu bangsa kami, terutama dalam menangani korban perang yang terjadi,” katanya.

Menurut Ahmad Muhammad Atiyah Bahr, Bangsa Palestina bangga terhadap Indonesia, merasakan dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina, mulai dari presiden, parlemen dan seluruh rakyat Indonesia. “Kami menyaksikan Indonesia mengecam serangan Israel ke Palestina ke Gaza, kami lihat air mata bangsa Indonesia akan terjadinya setangan terhadap Gaza,” ungkapnya.

Ahmad Muhammad Atiyah Bahr menegaskan meskipun peperangan dan pemboikotan yang terjadi tidak akan memadamkan perjuangan Bangsa Palestina, lebih lagi sejak pemilihan umum 2006 bangsa Palestina diperangi karena memperjuangkan demokrasi.

Dunia menyaksikan pemilu itu dilakukan dengan bersih, hingga terjadi penculikan terhadap Anggota Parlemen, dan penyerangan tiga roket ke gedung parlemen, yang dilakukan Is-

rael.

Penahanan secara administratif tersebut, lanjutnya, bertujuan menghabisi sistem politik yang ada di Palestina, Negara Israel juga mencoba merusak Mesjid Al-Aqsa dengan menggali terowongan dibawahnya. Blokade dan boikot terus berlangsung termasuk pasokan obat-obatan yang diperlukan, “Palestina mengharapkan perjuangan penghancuran blokade tersebut baik dari politik maupun ekonomi dari Indonesia,” katanya.

Ahmad Muhammad Atiyah Bahr mengatakan Palestina akan terus melawan Israel untuk memperoleh kemerdekaan, “Perjuangan akan terus dilakukan karena perjuangan kami lebih keras dari tank bangsa Israel dan Amerika, kami tidak akan mundur setapakpun,” tegasnya.

Banyak dukungan Negara Arab maupun Eropa, tentu dunia melihat kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Bangsa Palestina, “Kami akan terus berjuang hak kami terhadap Masjid Al-Aqsa,” tegasnya lagi. (as)foto:parle

DPR Ingatkan Pemerintah Segera Serahkan Draf RUU KUHP dan KUHP

Berlarut-larutnya penyelesaian draf revisi RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) membuat anggota Komisi III DPR kecewa. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki 'induk' dari aturan perundang-undangan yang merupakan warisan pemerintah penjajah Belanda ini.



Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir saat rapat kerja dengan Menkumham.

“Zaman menteri Patrialis pemerintah berjanji draf diserahkan September tahun lalu, Menkumham sekarang janji awal tahun ini, kenapa masih ditahan terus. KUHP era penjajah ini telah menzalimi bangsa kita karena tidak ada sanksi bagi penegak hukum yang sewenang-wenang. Kalau pemerintah tidak mampu DPR perlu ambil alih dengan usul inisiatifnya,” kata anggota Komisi III, Nudirman Munir dalam Rapat Kerja dengan Menkumham di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/12).

Martin Hutabarat dari FP Gerindra mengaku pesimis pemerintah dan DPR punya cukup waktu untuk membahas 2 RUU penting ini. Menurutnya dalam kondisi normal setidaknya diperlukan waktu 2 – 3 tahun untuk membahasnya, sementara tahun depan para politisi sudah mengalihkan perhatian pada persiapan pemilu.

“Oleh karena itu saya mengatakan berhentilah kita bicara tentang RUU KUHP dan KUHP pada periode sekarang. Bapak menteri tidak perlu bicara lagi tentang itu dan kita juga tidak per-

lu menanyakannya lagi karena sudah tidak realistis. Sudah tidak mungkin DPR periode ini menyelesaikannya,” tandas wakil rakyat dari dapil Sumut ini.

Anggota FPDIP Nurdin mengingatkan pentingnya menyelesaikan dua undang-undang ini agar sinkronisasi dengan undang-undang lain dapat terjaga. Ia memberi contoh RUU Sistem Peradilan Anak yang sedang dibahas Komisi Hukum ini. Hasilnya dikhawatirkan akan berbeda karena induknya RUU KUHP direvisi belakangan.

Menkumham Amir Syamsudin menjelaskan sebenarnya draf revisi sudah selesai sejak 15 tahun lalu. Namun masih ada perbedaan persepsi terutama soal kewenangan upaya paksa diantara instansi penegak hukum. Ia berharap jalan buntu yang menghambat selama ini dapat dicarikan titik temunya.

“Ada beberapa pihak yang masih keberatan tentang kewenangan upaya paksa tadi. Sebelum masuk ke DPR tetap perlu ada kesepakatan, agar rancangan berhasil tentu perlu persiapan, perlu ada konsensus, bottle neck-nya disana,” papar menteri yang juga politisi Partai Demokrat ini.

Rapat kerja Komisi III DPR RI akhirnya menyimpulkan kembali mendesak pemerintah agar segera menyerahkan RUU KUHP dan KUHP ke DPR RI. Surat resmi mengenai permintaan ini juga akan disampaikan kepada Presiden RI.

“Draf-nya sudah selesai biarkan persoalan politik hukum diselesaikan di parlemen. Kita berharap di era pemerintahan SBY dua UU penting ini tuntas, karena masyarakat benar-benar menunggunya,” kata Nasir Djamil, pimpinan sidang. (iky)foto:wy/parle

Komisi VIII Setujui 2 RUU Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah (kiri) saat menandatangani persetujuan RUU bersama pemerintah

Komisi VIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan RUU Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, yang berturut-turut dibahas pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR, Rabu - Kamis (6-7/6) yang dipimpin ketua Komisi VIII Ida Fauziah di Nusantara II DPR RI.

Raker Komisi VIII dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menyetujui RUU-RUU tersebut untuk dibahas pada Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI mendatang. Keberhasilan pembahasan RUU ini mencerminkan komitmen bersama Pemerintah dan DPR untuk terus memajukan, memenuhi,

memerangi tindak pidana penjualan, prostitusi dan pornografi anak. Ratifikasi Protokol Opsional dapat memberikan dasar legislasi yang kuat untuk pemanfaatan kerangka kerja sama internasional, utamanya menyangkut penetapan yurisdiksi atas delik yang diatur.

Mengenai implementasi undang-undang, Anggota Komisi VIII dari F-PKS Jazuli Juwaini mengingatkan akan pentingnya sosialisasi UU ini ke masyarakat. "Sosialisasinya itu harus tepat pada sasaran sehingga publik dan masyarakat itu mengetahui ada ratifikasi, ada undang-undang dan seterusnya.." Perlindungan Pemerintah pada anak harus berwujud nyata dengan pengawasan yang maksimal dengan adanya kontrol dan pengawasan sekaligus. "Jadi jangan sampai undang-undang sebagai sebuah undang-



Menlu Marty Natalegawa (ke dua dari kanan) dan Menteri PPPA Linda Amalia Sari (paling kanan) saat Raker dengan Komisi VIII DPR

menghormati dan melindungi hak-hak anak, khususnya dalam memastikan anak-anak tidak dilibatkan atau dijadikan korban dalam konflik bersenjata dan untuk memperkuat landasan hukum bagi kebijakan nasional dalam

undang, ratifikasi sebagai sebuah ratifikasi, begitu kita sahkan lalu tidak bisa berjalan di tataran implementasi, karena pengawasan kurang sehingga kesadaran pelaksana juga kurang" tegasnya. (ray) foto:ry/parle

DPRD Sumsel Minta Kenaikan 10 persen Kuota BBM Subsidi

DPRD Sumsel meminta dukungan DPR terkait penambahan kuota BBM Bersubsidi sebesar 10 persen. Pendapat tersebut mengemuka saat Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Ketua DPRD Sumsel Warsita Bambang Utoyo dan rombongan, di Gedung Nusantara III, Senin, (11/6).



Antrian panjang pengisian bahan bakar kendaraan disalah satu SPBU

Menurut Warsita, tujuan DPRD Sumsel menemui Ketua DPR karena mulai maraknya kelangkaan minyak karena kuota yang diberikan kami tidak cukup. Hal ini membuat sistem perekonomian terganggu, kios banyak tutup bahkan minyak di pedalaman naik sampai dua kali lipat.

“Dengan pertumbuhan ekonomi di Sumsel kami minta penambahan solar dan premium sebesar 10 persen, bahkan Gubernur sudah memberikan surat kepada BP Migas kami hanya minta Ketua DPR mendukung penuntasan kelangkaan minyak ini di Sumsel,”paparnya.

Pada kesempatan itu, Sumsel meminta jatah 10 persen solar dan 15 persen premium dari 2.5 juta kl yang diberikan Kalimantan. Palsanya, sejak jaman belanda Sumsel memang dikenal sebagai daerah produksi Minyak dan bahkan belum lama ini menjadi daerah lumbung energy nasional. “BBM bersubsidi sering disalahgunakan oleh Pengusaha karena itu kita minta Ketua DPR kirim surat kepada Kapolri untuk mencegah



Ketua DPR Marzuki Alie saat berdialog dengan perwakilan DPRD Sumsel

BBM disalahgunakan,”tegas Warsita.

Anggota DPRD Sumsel dari Partai Demokrat Muhammad F. Ridho mengatakan, pada Maret tahun ini Sumsel sudah mengalami kelangkaan BBM. “Ini menjadi pertanyaan kita semua mengapa sejak bulan maret sudah langka. Kuota solar 607 ribu KL realisasi 641 ribu KL kekurangan 34 ribu

KL,”paparnya.

Karena itu, rata-rata kebutuhan sebesar 50.628 KL perbulan. Ini mengindikasikan adanya penimbunan dan konsumsi dari industri pertambangan batubara dan industri lainnya. “Seharusnya mereka menyiapkan tanki sendiri, akan kita pertanyakan kepada BPH Migas nantinya,”ujarnya.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, situasinya memang serba salah saat ini, artinya kalau pemerintah melanggar volume kuota maka pemerintah dianggap melanggar UU. “Sekarang ini situasinya memang begitu,”ujarnya.

Marzuki mengatakan, dia men-

dukung seratus persen penambahan kuota BBM bersubsidi. “ Khusus pemakaian BBM non subsidi bagi alat berat pertambangan, memang perlu penegasan surat Menteri ESDM palsanya, memang semua alat berat memang tidak boleh beli BBM bersubsidi terkait tambang mungkin diluar materialnya,”katanya.(si)/foto:iw/parle.

Aparat Kejaksaan di Daerah Pemekaran dan Perbatasan Perlu Dukungan

Dalam kunjungan ke beberapa daerah Komisi III DPR RI menemukan fakta aparat kejaksaan di daerah yang baru dimekarkan dan perbatasan belum mendapat dukungan optimal dari Kejaksaan Agung.

Pendapat tersebut disampaikan anggota Komisi III dari FPAN Taslim saat Rapat Kerja dengan Jaksa Agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/6/12).

Sebagai contoh, menurutnya di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, ada wilayah yang belum mempunyai Kajari, sementara biaya untuk ke daerah induk sangat besar sehingga proses hukum disana berjalan lambat.

“Kajari di daerah seperti ini strategis tidak hanya mengurus proses hukum saja tapi fungsi lain dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan pemahaman hukum masyarakat. Temuan kami di daerah perbatasan ini, orang lebih paham RMS dari pada hukum Indonesia,” tandasnya.

Ia meminta Jaksa Agung membuat perencanaan yang jelas agar pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri di wilayah pemekaran dan perbatasan dapat segera direalisasikan.

Eddy Ramly Sitanggang dari FPD menyatakan pada tahun anggaran yang akan datang Komisi Hukum DPR telah sepakat untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. “Kami dukung anggaran Rp.4,1 triliun, sebenarnya kejaksaan butuh minimal

Rp.6 triliun jadi supaya seimbang gitu lho. Jangan kita tuntutan kinerja baik tapi tidak balance,” imbuhnya.

Ia juga menemukan fakta fasilitas aparat sangat minim terutama masalah transportasi. Pada saat ada pengejaran terhadap pelaku pidana, aparat di daerah betul-betul tidak berdaya. Jangan sampai karena keterbatasan anggaran terjadi supply demand, ada yang memberi ada yang menerima, sehingga penegakan hukum tidak berjalan.

Jaksa Agung Basrief Arief membenarkan belum optimalnya duku-

ngan anggaran kepada para jaksa yang berada di daerah pemekaran dan perbatasan. Fasilitas yang dapat diberikan sejauh ini diantaranya menyediakan perumahan dan dukungan anggaran transportasi.

“Pada kondisi tertentu apabila di daerah ada kasus besar saya meminta dilaporkan langsung. Kasus tertentu kita minta mereka gelar perkara di Kejagung. Apabila dianggap perlu kita bisa turunkan tim supervisi dari pusat,” demikian Basrief. (iky)foto:wy/parle



Eddy Ramly Sitanggang, anggota Komisi III DPR

DPR Desak Menteri ESDM Berantas Penimbun BBM Subsidi

Anggota Komisi VII DPR Satya Yudha mendesak Menteri ESDM memberantas para penimbun BBM. Pasalnya, perilaku penimbun meresahkan dan membuat kuota BBM menjadi cepat habis.

“Para demonstrasi itu digerakkan oleh para penimbun BBM makanya kita harus memberantas para penimbun,”ujarnya saat Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik

dan jajarannya, di Gedung Nusantara I, Senin, (11/6).

menyangkut kuota, lanjut Satya, istilah kuota itu harus mampu mendisi-iplinkan kita dalam melakukan

pembelanjaan. “Nantinya kita akan berusaha bicara bagaimana seefisien mungkin pendekatannya,”katanya. Kalau menghitng volume, lanjutnya, kita menyadari masih maraknya pen-



Anggota Komisi VII DPR, Satya Yudha

yelundupan dimana-mana, bahkan ada miss use tadinya BBM Subsidi ternyata digunakan oleh Industri.

Khusus Volume gas dan migas, kita harus memompa dari project atau sumur-sumur yang ada. "Ini sebenarnya domain BP Migas artinya kalau tidak realistis jangan menerapkan harga yang tinggi tetapi angka yang sebenarnya,"paparnya.

Sementara Andi Rahmat (F-PKS) menilai, Struktur lifting migas memang mengalami kenaikan pada tahun 2007 atau 2008 lalu. namun sampai sekarang sudah tidak beranjak lagi. sementara soal gas, lanjut Andi, ini merupakan terobosan baru menggabungkan lifting migas dan gas. "Kalau lifting minyak ada ICP sementara gas harus ada IGP yang harus diterapkan apalagi kalau kita bicara subsidi listrik nanti,"ujarnya. (si) foto:wy/parle

Komisi I Setujui RUU Kerjasama Pertahanan Dengan Ceko dan Italia

Komisi I DPR RI menyetujui 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kerjasama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Ceko dan Pemerintah Republik Italia. Seluruh fraksi menginginkan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden, sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Pimpinan Komisi I DPR saat berdiskusi pada rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan, Wamen Luar Negeri dan Ses.Dirjen PP Kemenhum dan HAM

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, dengan Menhan Purnomo Yusuf Wardhana, Wakil Menteri Luar Negeri

terian Hukum dan HAM Supriyanto, di gedung DPR RI, Senin (11/6).

Kedua RUU tersebut antara lain, pertama, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Repu-

blik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government Czech Republic on Cooperation Activities in the Field of Defence),

Kedua, RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Departement of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of Difence of the Intalian Republic Concerning Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistic and Industy). (as)foto:wy/parle

Komisi V Minta Kementerian PU Lakukan Kajian Lingkungan

Komisi V DPR RI minta Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera melakukan kajian lingkungan hidup untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang. Kajian ini diperlukan dalam proses perencanaan dan pengendalian pengelolaan infrastruktur sungai di Kementerian Pekerjaan Umum.

Harapan ini disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, Rabu (13/6) di gedung DPR.

Rapat Komisi V DPR kali ini mengagendakan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum di Tahun 2011.

Selain melakukan kajian lingkungan hidup, Kementerian Pekerjaan Umum juga perlu memperbaiki sistem penyusunan dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, proses penyusunan dan pembuatan Lakip yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja unit-unit pemerintahan di Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk melakukan itu semua, Komisi V menanyakan bagaimana langkah dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan Kementerian PU dalam menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 tersebut termasuk penyempurnaan metode, sistem dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, hampir seluruh proyek yang ada di Kementerian PU selalu memperhatikan masalah AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan).

Untuk laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (Lakip) selalu dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan tanggapan dari Kementerian PAN menyatakan baik.



Ketua Komisi V DPR Yasti S. Mokoagow saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum

Sejak tahun 2009 dan 2010, kata Djoko, opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PU masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Kami berharap ke depan laporan keuangan Kementerian PU dapat terus ditingkatkan sehingga memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian," katanya.

Sementara tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait beberapa temuan, Djoko mengatakan, untuk temuan perhitungan dan pembayaran eskalasi pada pekerjaan pembangunan jembatan nasional Suramadu bentang tengah tidak sesuai dengan ketentuan, karena penggunaan base-indeks seharusnya sebelum harga penawaran.

Menurut Djoko rencana tindak yang dilakukan adalah akibat kesalahan perhitungan dalam penerapan base-indeks, Kasatker akan melakukan pemotongan pada sisa pembayaran eskalasi yang berikutnya sebesar kurang lebih Rp 7,6 miliar.

Selain itu, terdapat temuan beberapa aset tetap berupa tanah pada Kementerian PU yang belum dilengkapi Bukti Kepemilikan berupa sertifikat. Dalam hal ini rencana tindaknya adalah Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPN untuk mengoptimalkan pembuatan sertifikat tanah Kementerian PU.

Untuk kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, terdapat temuan pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian PU belum sepenuhnya berpedoman ketentuan Peraturan-Undang yang berlaku.

Rencana tindaknya adalah Sekjen PU telah menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri berkoordinasi dengan satker-satker penerima hibah untuk mengungkapkan hibah sesuai ketentuan yang berlaku. (tt)foto:wy/parle

KY Diminta Segera Kirim 3 Calon Hakim Agung Tambahan ke DPR

Rapat pleno Komisi III memutuskan Komisi Yudisial perlu segera melengkapi usulan 15 nama calon Hakim Agung yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

“Semua Fraksi sepakat 12 calon yang telah dikirimkan ke DPR dikembalikan untuk segera dilengkapi. Jadi perlu tambahan 3 nama lagi,” jelas Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika usai rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/6/12).

Berdasarkan UU No 18/2011 tentang Perubahan atas UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial, calon yang

dikirimkan untuk mengikuti fit and proper test di DPR harus berjumlah 3 kali lipat dari kebutuhan. Berarti apabila Mahkamah Agung memerlukan 5 orang hakim baru maka KY harus menyerahkan 15 kandidat.

Dalam rapat internal yang berlangsung tertutup itu disepakati pula Komisi III tidak akan menggabung proses uji kepatutan dan kelayakan dengan permintaan 4 Hakim Agung

tambahan yang kembali disampaikan MA. Pertimbangannya menurut Pasek itu berarti KY harus mencari 12 kandidat yang tentu akan memerlukan waktu lebih lama. Padahal keperluan 5 hakim yang diajukan MA sebelumnya sudah mendesak.

Ketika ditanya wartawan apakah pengembalian ini tidak mempengaruhi batas waktu pembahasan di DPR. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan tidak. “DPR diberi waktu 1 bulan sejak dimulainya seleksi bukan setelah surat diterima dari KY,” imbuhnya.

Terkait mekanisme untuk mencari 3 kandidat tambahan tersebut ia menyerahkan sepenuhnya kepada KY sesuai kewenangan yang diberikan UU. Menurutnya KY perlu bekerja lebih keras untuk menyampaikan kepada publik agar anak bangsa terbaik lebih banyak lagi mendaftar menjadi calon hakim agung.

“Sekarang KY harus meningkatkan kinerja. Kalau kualitas calon hakim tidak memenuhi syarat sosialisasikan lebih luas lagi sehingga lebih banyak yang bisa melamar,” demikian Suardika. (iky)foto:wy/parle



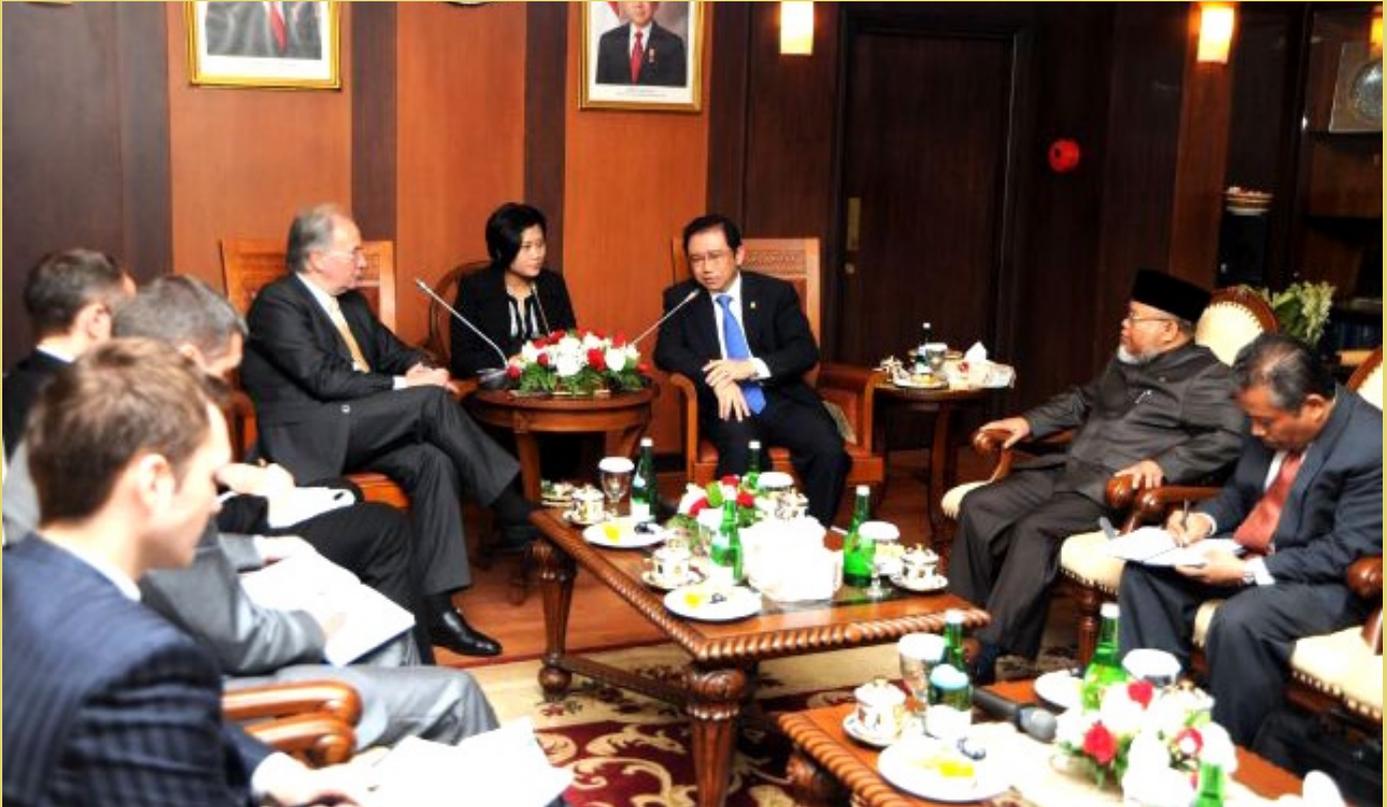
Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika



Pimpinan Komisi Yudisial saat rapat dengan komisi III DPR

DPR RI Dukung Dibukanya Kedubes Indonesia di Belarus

DPR RI mendukung dibukanya Kedutaan Besar Indonesia di Negara Belarus, untuk lebih meningkatkan hubungan diplomatik kedua Negara.



Suasana pertemuan Ketua DPR Marzuki Alie dengan Delegasi Belarus

“Saya yakin Kedutaan Besar Indonesia akan dibuka di Belarus hanya menunggu waktu yang tepat, saya yakin pada saatnya akan di buka,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie, saat menerima Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Belarus H.E. Mr. Sergei Martynov, di Gedung Nusantara III DPR, Selasa (12/6).

Mazuki Alie, mengharapkan dengan kunjungan Menlu Belarus, dapat meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antar kedua Negara yang sudah terjalin dengan baik selama ini. “Kehadiran Menlu dapat merealisasikan kesepakatan-kesepakatan yang selama ini telah dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang konkret dalam rangka membangun hubungan diantara kedua Negara,” katanya.

Marzuki mengatakan, Indonesia

dapat meningkatkan perannya guna mendorong masuknya investasi Eropa ke Indonesia. “Saat ini Eropa sedang mengalami krisis, akibat krisis Yunani akhirnya menjalar ke seluruh Eropa, guna mendorong peningkatan kerjasama ekonomi, kita harapkan semakin terjalin hubungan erat Indonesia dengan Belarusia. “Tentu kita mengharapkan hubungan ini saling menguntungkan baik untuk kepentingan Negara-negara Eropa maupun khususnya Negara Belarus,” tegasnya.

Indonesia, lanjutnya, merupakan Negara besar dengan pasar yang besar sehingga menjadi tujuan utama pasar di kawasan Asean yang masih berkembang. Dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang besar tersebut diharapkan dapat bersinergi dan semakin meningkat kerjasama di

bidang alat-alat berat yang dihasilkan oleh Negara Belarus.

“Dengan SDA Indonesia, perkebunan dan pertambangan sangat cocok, sehingga perlu didorong dibangun joint venture untuk segera dibangun industri alat berat di Indonesia, yang bertujuan memenuhi kebutuhan yang besar akan alat berat di Indonesia untuk pembangunan perkebunan dan eksplorasi pertambangan,” ungkapnya.

Saat ini alat-alat besar yang diproduksi jepang, tidak bisa langsung dibeli tetapi harus inden terlebih dahulu, artinya pasar masih terbuka di Indonesia. “Tentu peluang masih baik untuk joint venture dengan perusahaan Indonesia,” papar Marzuki Alie.(as)/ foto:iwan armanias/parle.



Delegasi parlemen Palestina yang dipimpin Wakil Ketua Parlemen Ahmad Muhammad Atiyah Bahr diterima BKSAP yang dipimpin Ketua BKSAP Surahman Hidayat (foto kiri) dan melakukan Courtesy Call dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budhi Santoso (foto kanan). 13 Juni 2012. foto:RY



Ketua DPR RI Marzuki Ali melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Palestina Ahmad Muhammad Atiyah Bahr beserta rombongan, di Ruang Tamu Pimpinan. 14 Juni 2012. foto:RY

Ketua DPR RI Marzuki Ali menerima Duta Besar India Gurjit Singh di ruang kerjanya. 12 Juni 2012. foto:IW



Rapat Komisi II dengan acara pendapat fraksi mengenai Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, di Gedung Nusantara DPR Jakarta, 13 Juni 2012. foto:WY

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**